

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, dunia sedang dilanda wabah virus yang begitu mengkhawatirkan. Secara resmi, negara China melaporkan kemunculan virus ini kepada WHO (*World Health Organization*) pada 31 Desember 2019 (BBC News Indonesia, 2020). Virus ini merupakan *Coronavirus* atau yang biasa lebih dikenal sebagai *Covid-19*. Manusia yang terinfeksi virus ini biasanya memiliki tiga gejala umum seperti demam, batuk kering dan sesak napas. Bahkan dalam banyak kasus, *Coronavirus* dapat mengakibatkan kematian.

Awalnya banyak negara yang salah menilai dan menganggap bahwa *Covid-19* bukanlah virus yang serius. Negara-negara besar seperti Amerika dan Italia pun pada awalnya meremehkan kehadiran virus ini. Dengan demikian, banyak negara besar yang terlambat dalam menerapkan pembatasan sosial hingga larangan kunjungan antar negara satu dan lainnya (Gouw, 2020). Salah satu dari beberapa alasan yang menyebabkan negara meremehkan *Covid-19* adalah keterlambatan WHO dalam menetapkan Corona sebagai pandemi global.

Secara resmi, WHO memang baru menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi global pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020. Alasan penetapan *Covid-19* menjadi pandemi global tidak lain adalah penyebarannya yang semakin masif di seluruh dunia (Hatta, 2020). Tingkat penularan yang begitu cepat menyebabkan penyebaran virus begitu cepat dan mudah.

Hal ini terbukti saat pertama kali virus Corona masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Pengumuman resmi awal Maret ini bahwa terdapat dua kasus pasien positif *Covid-19*. Hingga kini, kasus konfirmasi positif virus Corona terus menerus naik dan belum menunjukkan adanya tanda penurunan. Merujuk kepada data Kompas, per hari Rabu 28 Oktober 2020, total kasus positif *Covid-19* di dunia terkonfirmasi mencapai 44.221.045 (Kompas.com, 2020).

Berdasarkan data yang dirilis di situs Kemenkes.go.id, terjadi penambahan kasus konfirmasi positif *Covid-19* sebanyak 3.565 kasus di Indonesia. Penambahan ini membuat Indonesia memiliki 404.048 kasus per tanggal 29 Oktober 2020. Sedangkan terdapat penambahan sebanyak 3.985 pada kasus sembuh dan 89 kasus meninggal, sehingga total kasus meninggal menjadi 13.701 (Kholid, 2020).

Walaupun secara persentase angka kematian akibat *Covid-19* terbilang cukup rendah yaitu 2,6 persen. Namun bila melihat jumlah penyebaran, maka jumlah kematian yang diakibatkan oleh virus ini tidaklah kecil. Terlebih lagi, angka kematian akibat virus Corona di Indonesia mencapai lebih dari 3 persen atau lebih tinggi dari persentase global. Inilah yang seharusnya menjadi alasan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga diri agar tidak terinfeksi virus Corona.

Oleh karena penyebaran yang begitu cepat, Pemerintah Indonesia tentunya tidak tinggal diam begitu saja. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020. Perppu ini berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 405,1 triliun.

Menindaklanjuti Perppu yang telah dibuat, Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020. Beberapa poin isi Perpres tersebut adalah pemotongan anggaran dari sebagian kementerian hingga mencapai Rp 97,42 triliun. Adapun kebijakan yang cukup jelas terasa pada saat pandemi yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa dikenal dengan PSBB. Kebijakan ini pun dapat dilaksanakan di suatu daerah dengan usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Menteri Kesehatan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

PSBB telah diterapkan di sebagian besar wilayah Indonesia oleh Pemrov maupun Pemda setempat. Masing-masing Pemrov hingga Pemda memiliki strategi yang unik dalam mencegah penyebaran Covid-19. Anies Baswedan misalnya, orang yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini telah merancang strategi untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Paket kebijakan yang Anies lakukan adalah kewajiban menggunakan masker, membatasi pergerakan orang keluar-masuk Jakarta saat Lebaran, distribusi bantuan sosial, dan lainnya (Larassaty, 2020).

Strategi Baru Anies dalam Tangani Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta

Levi Larassaty - Minggu, 3 Mei 2020 | 08:35 WIB



Anies Baswedan ungkap 3 langkah barunya dalam menangani Covid-19 di DKI Jakarta.

Gambar 1.1 Cuplikan Berita tentang Strategi Baru Anies Tangani Covid-19
Sumber: Larassaty 2020

Serupa tapi tak sama, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat memiliki tiga strategi dalam menangani Covid-19. Strategi pertama ialah pencegahan; kedua ialah pelacakan dan pengetesan, ketiga adalah perawatan. Ketiga strategi ini diungkapkan Ridwa Kamil pada jumpa pers Gugus Tugas Nasional Covid-19 di Jakarta, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020.

Strategi pertama dilakukan dengan menerapkan pelarangan mudik dan kedisiplinan terkait *physical distancing*. Strategi kedua dilakukan dengan pengetesan secara masif bagi para penduduk Jawa Barat. Strategi ketiga

dijalankan dengan menyediakan sekitar 105 rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 dan penyediaan ventilator hasil produksi lokal (Batubara, 2020).

Tiga Strategi Ridwan Kamil Tangani Covid-19 di Jawa Barat

Puteranegara Batubara, Okezone · Sabtu 16 Mei 2020 19:43 WIB



Ridwan Kamil (Okezone)

Gambar 1.2 Cuplikan Berita Strategi Ridwan Kamil Tangani Covid-19
Sumber: Okezone 2020

Strategi Ganjar Pranowo pun tak kalah unit dengan Gubernur lainnya. Jogo Tonggo merupakan salah satu strategi yang diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut. Jogo Tonggo merupakan kosakata yang berasal dari bahasa daerah Jawa yang berarti “menjaga tetangga”. Gerakan ini menghimbau seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk menjaga kesehatan tetangga dengan cara tidak keluar rumah, mengenakan masker, dan tetap melakukan *social distancing* (Putri, 2020).

Ganjar Pranowo juga mengedepankan adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Cara ini dia buktikan dengan menawarkan pilihan untuk menerapkan PSBB kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota di masing-masing daerahnya. Gubernur yang akrab dengan sapaan “mas Ganjar” ini percaya bahwa pemimpin hadir untuk memberikan arahan/kontrol dan membangun kesadaran bersama sebagai kunci penanganan Covid-19 (Arif, 2020).

Ganjar Pranowo Paparkan Strategi 'Jogo Tonggo' Tangani Corona di Jateng

Zunita Putri - detikNews

Selasa, 12 Mei 2020 16:47 WIB

0 komentar

SHARE   



Foto Ganjar Pranowo: Humas Pemprov Jateng

Gambar 1.3 Cuplikan Berita tentang Strategi Ganjar Pranowo 'Jogo Tonggo'
Sumber: Detik.com 2020

Ganjar Beri Kebebasan Daerah dalam Menangani Covid-19

Selasa, 19 Mei 2020 Abdul Arif



Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (istimewa)

Gambar 1.4 Cuplikan Berita tentang Ganjar Pranowo Beri Kebebasan
Sumber: Batubara 2020

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Tengah berlangsung cukup baik. Hal ini terlihat dari kerjasama yang dilakukan oleh keduanya dalam penanganan Covid-19. Bukti lain yang dapat dilihat adalah tidak ditemukannya pemberitaan negatif terhadap kerjasama diantara Pemprov dan Pemkot/Pemkab.

Begitu juga dengan provinsi besar lainnya seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun terdapat hal menarik yang muncul dari Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut adalah “kurang harmonisnya” hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur dalam penanganan pandemi Covid-19.

1.2 Identifikasi Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa Jawa Timur memiliki dua tokoh perempuan membanggakan yang memimpin jalannya pemerintahan. Kedua tokoh kebanggaan Jawa Timur ini adalah Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini. Khofifah merupakan Gubernur perempuan pertama yang berhasil terpilih untuk memimpin Jawa Timur (Aquina, 2019). Sedangkan Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini merupakan Wali Kota perempuan pertama di Surabaya (Mulyaningtyas, 2019).

“Konflik” diantara keduanya memang sering menjadi buah bibir bagi masyarakat khususnya media. Media cukup sering mengangkat pemberitaan tentang perseteruan diantara Khofifah dan Risma. Menurut infografis yang diterbitkan oleh Republika, perseteruan keduanya dimulai sejak Pilkada tahun 2018. Khofifah maju sebagai pasangan calon (paslon) gubernur yang diusung oleh koalisi Golkar, Demokrat, Nasdem, Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Koalisi tersebut berseberangan dengan Risma yang berasal dari Partai PDI Perjuangan.

Kemudian, babak baru “konflik” diantara keduanya muncul kembali pada November tahun 2019. Kala itu, Khofifah mengatakan bahwa aroma sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo tercium hingga Stadion Gelora Bung Tomo. Sontak saja pernyataan Khofifah mendapat kritikan langsung dari Pemkot Surabaya (Puspita, 2020). Sampai pada tahun 2020, perseteruan kembali muncul dalam tugas penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

Pada dewasa ini, Covid-19 memang menjadi isu yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Ditambah lagi, perseteruan antara dua wanita kebanggaan Jawa

Timur terjadi di tengah pandemi. Disaat Pemerintah Provinsi seharusnya bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten, Risma malah mengungkapkan kekesalannya terhadap Pemprov Jawa Timur.



Gambar 1.5 Infografis Perseteruan Panjang Risma dan Khofifah
Sumber: Republika.co.id 2020

Kronologi Risma Geram ke Pemprov Jatim soal 2 Mobil Corona

CNN Indonesia | Jumat, 29/05/2020 20:31 WIB

Bagikan :  



Wall Kota Surabaya Tri Rismaharini geram ketika Pemprov Jatim mengambil 2 mobil tes corona pemberian BNPB (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Gambar 1.6 Cuplikan Berita Kronologi Risma Geram
Sumber: CNNIndonesia 2020

Kemarahan besar Risma kepada Pemprov Jatim (Jawa Timur) bermula ketika dua mobil kiriman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tes Covid-19 diambilalih. Kedua unit mobil Lab Bio Safety level 2 tersebut dialihkan ke Lamongan dan Tulungagung oleh Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi.

Konflik ini pun terus bergulir dan tak disangka dapat melebar ke isu lainnya. Beberapa isu yang muncul setelah adanya konflik ini adalah adanya komentar dan kritikan dari beberapa partai politik dan kalangan masyarakat; dan klaim Risma mengenai zonasi Covid-19 hijau bagi Surabaya. Khofifah pun memberi komentar terhadap pernyataan Risma yang dianggap menjadi polemik. Isu ini pun sempat dikaitkan dengan sentimen politik diantara keduanya.

Kisruh Mobil Corona, Demokrat Minta Khofifah-Risma Berdamai

CNN Indonesia | Minggu, 31/05/2020 11:35 WIB

Bagikan :  

Gambar 1.7 Cuplikan Berita tentang Demokrat Minta Khofifah-Risma Damai

Sumber: CNNIndonesia 2020

Risma Klaim Surabaya Zona Hijau, Wiku: Hanya Satgas Covid-19 yang Boleh Tentukan

Reporter: **Dewi Nurita**

Editor: **Eko Ari Wibowo**

Kamis, 6 Agustus 2020 18:48 WIB

Gambar 1.8 Cuplikan Berita tentang Klaim Risma Zona Hijau Surabaya

Sumber: Tempo 2020

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, timbul beberapa pertanyaan bagi peneliti tentang pembingkaiian berita yang dilakukan oleh media *online* CNN Indonesia dan Tempo. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana media melakukan pembingkaiian berita yang berkaitan dengan polemik mobil PCR di Surabaya dan menyajikannya di *platform* media daringnya masing-masing.

Adapun peneliti memilih media *online* CNN Indonesia dan Tempo karena kredibilitasnya yang terpercaya. Kredibilitas tersebut dibuktikan dengan adanya verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers. Verifikasi ini ditandai dengan data perusahaan kedua media yang terdaftar sebagai perusahaan pers pada situs Dewan Pers. Sesuai UU No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers merupakan lembaga yang diberi wewenang membantu masyarakat dalam menghadapi beragam informasi dari

berbagai media. Perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers tentunya telah memenuhi segala ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 yang didalamnya menegaskan bahwa pers nasional harus menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya berdasarkan pers yang profesional (Dewan Pers, 2018).

Alasan selanjutnya adalah karena peneliti menemukan cukup banyaknya pemberitaan terkait polemik mobil PCR di Surabaya. Kedua media mengangkat pemberitaan yang cukup lengkap dari topik tersebut. Bila ditelusuri lebih lanjut, karakteristik dari kedua media pun cukup berbeda dimana teks pemberitaan CNN Indonesia yang cenderung lebih panjang dibanding Tempo. Tempo memuat teks berita yang seringkali lebih singkat.

Yang terakhir adalah adanya perbedaan latar belakang dari kedua media. CNN Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara media lokal (Trans Media) milik Chairul Tanjung dengan media global *Cable News Network* (CNN) milik perusahaan *Turner Broadcasting system* (Alam, 2019). CNN dikenal sebagai media pelopor penyiaran 24 jam pertama (Nafi, 2015). Sedangkan, Tempo merupakan media lokal yang pertama kali didirikan oleh Goenawan Mohammad dan kelima wartawan lainnya. Tempo juga dikenal sebagai media yang pernah dibredel karena kritikan tajamnya di zaman rezim Order baru (Tempo).

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti telah menentukan rumusan masalah yaitu bagaimana CNNIndonesia.com dan Tempo.co melakukan *framing* pemberitaan terkait polemik mobil PCR di Surabaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana CNNIndonesia.com dan Tempo.co melakukan *framing* pemberitaan yang berkaitan dengan polemik mobil PCR di Surabaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berikut adalah kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis.

1. Secara akademis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan terhadap analisis pembingkai berita lainnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana media membingkai sebuah peristiwa serta menjadi pencerahan bagi media untuk selalu menjaga objektivitas

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dibuat agar dapat memahami secara lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diulas. Berikut adalah uraian sistematika penelitian pada penelitian ini.

1. Bab I Pendahuluans

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

2. Bab II Subjek dan Objek Penelitian

Bab ke-2 ini akan menjelaskan secara lebih rinci tentang objek penelitian yang berisi sejarah kedua media pemberitaan.

3. Bab III Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan satu demi satu kajian secara teoritis mengenai analisis framing media.

4. Bab IV Metodologi Penelitian

Pada bab ke-4 akan dibahas mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data hingga metode analisis data.

5. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ke-5 berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan detail. Peneliti akan mengelaborasi hasil temuan dengan kajian teoritis yang telah dijabarkan pada bab tinjauan pustaka dan sumber-sumber pendukung lainnya.

6. Bab VI Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran bagi pembaca dan peneliti lainnya baik untuk keperluan secara praktis maupun teoritis.